

STABILITAS EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL: ANALISIS FUNGSI ANGGARAN PEMERINTAH

Della Anggun Mutiara¹, Aditya Wahyu Saputro², Yohana Clarita³, Nian Kurnia Galassanty⁴, Irvan Nur Ridho⁵

12345 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
Jalan. Budi Utomo No 10 Siman Ponorogo 6341 Jawa Timur Indonesia

Email: dellaanggunmutiara@gmail.com¹, aditiawahyusaputro@gmail.com², yhnaclrt07@gmail.com³,
niankurnia998@gmail.com⁴, Irvannurridho@gmail.com^{5*}

ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro, yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Artikel ini menganalisis fungsi anggaran dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal di Indonesia. Tiga fungsi utama anggaran alokasi, distribusi, dan stabilisasi dibahas secara mendalam untuk menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan ketimpangan, serta merespons dinamika ekonomi, termasuk krisis dan inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran anggaran negara sangat strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta menjaga keseimbangan fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Ditekankan pula pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Anggaran Negara, Stabilitas Ekonomi, APBN, SDGs.

ABSTRACT

Fiscal policy is a key instrument in macroeconomic management, implemented by governments through the regulation of national revenue and expenditure. This article analyzes the function of the national budget in maintaining economic stability, particularly within the context of Indonesia's fiscal policy. The three main functions of the budget allocation, distribution, and stabilization are explored in depth to demonstrate how fiscal policy can drive economic growth, reduce inequality, and respond to economic dynamics such as crises and inflation. This study adopts a descriptive qualitative approach based on literature review. The findings indicate that the national budget plays a strategic role in ensuring sustainable development, achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), and maintaining fiscal balance at both central and regional levels. The importance of transparent, accountable, and responsive budget management is emphasized in addressing global and domestic economic challenges.

Keywords: Fiscal Policy, National Budget, Economic Stability, State Budget, SDGs

I. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengatur dinamika perekonomian nasional, dengan cara mengelola penerimaan serta pengeluaran negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ekonomi makro sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kebijakan fiskal aktif—di mana pemerintah melakukan penyesuaian secara langsung terhadap tarif pajak atau besaran pengeluaran—dan kebijakan fiskal pasif, yaitu kebijakan yang secara otomatis menghasilkan peningkatan surplus atau pengurangan defisit anggaran tanpa adanya intervensi langsung dari otoritas (History et al., 2024).

Sebagai salah satu pilar kebijakan ekonomi nasional, kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam pengelolaan arus penerimaan dan belanja negara. Pemerintah seringkali memanfaatkan kebijakan ini sebagai alat untuk mencapai berbagai target ekonomi, seperti pengendalian tingkat pengangguran, stabilisasi laju inflasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi secara umum. Kebijakan fiskal menjalankan tiga fungsi utama dalam kerangka pengelolaan fiskal, yaitu: pertama, fungsi alokasi yang difokuskan pada penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi; kedua, fungsi distribusi yang berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sistem subsidi dan redistribusi pendapatan; dan ketiga, fungsi stabilisasi



yang bertujuan menjaga keseimbangan fundamental dalam sistem ekonomi nasional (Britania et al., 2024).

Lebih lanjut, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai serangkaian langkah pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan aktivitas ekonomi nasional melalui instrumen fiskal seperti pengenaan pajak, belanja negara, serta pembiayaan defisit melalui pinjaman. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Stabilitas ekonomi yang dicapai melalui kebijakan fiskal memiliki dampak langsung terhadap dunia usaha, karena menciptakan kepastian dan mengurangi ketidakpastian pasar, sehingga mempermudah pelaku bisnis dalam merumuskan strategi harga dan kebijakan ketenagakerjaan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat memperbesar ketidakpastian, menurunkan minat investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan menurunkan taraf hidup masyarakat (Rahman & Sudirman, 2025).

Seiring perkembangan zaman, khususnya sejak awal abad ke-20, penerapan kebijakan fiskal di berbagai negara semakin meluas dan kompleks. Banyak negara kini memosisikan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan ekonomi makro. Di tengah pesatnya globalisasi dan kemajuan teknologi, keberadaan kebijakan fiskal menjadi semakin signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Pada dasarnya, setiap kebijakan fiskal dirancang untuk memengaruhi pola belanja dan pendapatan pemerintah, dengan tujuan menyeimbangkan kondisi ekonomi suatu negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan arus penerimaan dan pengeluaran pemerintah demi tercapainya stabilitas ekonomi yang diinginkan, suatu konsep yang kemudian dikenal sebagai kebijakan fiskal atau politik fiskal (Nisa et al., 2023).

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah menjadi salah satu alat utama dalam mengelola dinamika perekonomian nasional, terutama dalam merespons berbagai tantangan baik di tingkat global maupun domestik. Penggunaan instrumen fiskal secara strategis terbukti berdampak signifikan terhadap permintaan agregat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui optimalisasi pengeluaran dan insentif fiskal, pemerintah mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong investasi, yang secara keseluruhan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti krisis moneter tahun 1997–1998 dan resesi global 2008, menunjukkan peran

sentral kebijakan fiskal sebagai alat utama pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi (Sari et al., 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal di Indonesia memegang peran penting sebagai instrumen pengendali utama dalam perekonomian nasional. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, kebijakan ini berpotensi besar menjadi alat efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas harga, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek kebijakan fiskal di Indonesia, sekaligus menyusun rekomendasi strategis dan aplikatif yang dapat dijadikan acuan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional.

II. METODE

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Tahapan analisis meliputi proses reduksi data untuk menyaring informasi relevan, analisis perbandingan antara berbagai sumber guna menemukan kesamaan maupun perbedaan informasi, hingga content analysis untuk menafsirkan makna dari isi literatur serta mengidentifikasi kecenderungan dan pola-pola utama (Nurjaman et al., 2022). Temuan dari proses tersebut kemudian disintesis untuk dirumuskan sebagai kesimpulan yang menjawab fokus penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai literatur berbeda, serta verifikasi silang antar referensi. Penggunaan referensi yang konsisten menjadi prinsip metodologis dalam membangun argumen ilmiah yang kredibel.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan metodologis yang dapat mempengaruhi hasil kajian, antara lain ketergantungan pada data sekunder tanpa pelibatan data primer, keterbatasan akses terhadap dokumen kebijakan dan data fiskal terbaru yang belum sepenuhnya tersedia untuk publik, serta cepatnya dinamika perubahan kebijakan fiskal yang membuat sebagian data dalam literatur menjadi kurang mutakhir. Analisis dikembangkan berdasarkan kerangka teori ekonomi makro baik klasik maupun modern, dengan menitikberatkan pada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari kebijakan fiskal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga membedah hubungan sebab-akibat serta dampak kebijakan fiskal terhadap kestabilan ekonomi, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Hnydiuk et al., 2018).



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Anggaran Dalam Konteks Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal, yang sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan makroekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengaturan dua komponen penting, yakni penerimaan negara yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan serta pengeluaran negara dalam bentuk belanja pemerintah. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek guna menstimulasi aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang melalui dampak terhadap sisi penawaran.

Dalam hal ini, anggaran negara berperan sebagai perangkat penting dalam perencanaan keuangan pemerintah. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rancangan mengenai estimasi pendapatan dan alokasi pengeluaran untuk periode tertentu yang umumnya disusun untuk satu tahun anggaran tetapi juga menjadi instrumen pengawasan guna memastikan pengelolaan pendapatan dan belanja negara berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipahami sebagai suatu rencana tahunan yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kemudian digunakan sebagai dasar hukum serta pedoman dalam pengelolaan keuangan negara.

Lebih dari sekadar dokumen administratif atau catatan pengeluaran dan pemasukan negara, anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal berfungsi strategis sebagai instrumen pengendalian arah kebijakan pembangunan nasional. Melalui APBN, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan, menjaga keseimbangan fiskal, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil, proporsional, dan efisien di berbagai sektor strategis dan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, anggaran tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan negara, tetapi juga mencerminkan arah strategis pembangunan ekonomi nasional (Muchlis & Wahyudi, 2023)

Melalui kebijakan fiskal yang dituangkan dalam bentuk anggaran, pemerintah dapat memengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk

meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus fiskal guna memulihkan daya beli masyarakat dan aktivitas produksi. Sebaliknya, pada saat inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kontraktif dengan mengurangi belanja atau meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli. Dengan kata lain, anggaran menjadi alat utama stabilisasi ekonomi nasional.

Anggaran juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Pendidikan, layanan kesehatan, serta investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, anggaran juga digunakan sebagai instrument redistribusi pendapatan, melalui berbagai program perlindungan sosial, subsidi, serta sistem perpajakan yang progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial (Yanti et al., 2024). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, anggaran negara juga memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Setiap pengeluaran dan penerimaan harus mendapat persetujuan lembaga legislatif, sehingga ada proses check and balances dalam penggunaan dana public. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan.

a) Fungsi Otorisasi

Fungsi ini bermakna bahwa anggaran negara merupakan dasar hukum yang sah bagi pemerintah untuk melakukan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran tertentu. Dengan adanya fungsi ini, setiap rupiah yang dikeluarkan atau diterima oleh negara harus tercatat dan telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dalam APBN. Artinya, tidak ada kegiatan pembiayaan atau proyek negara yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum anggaran yang jelas. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, karena uang yang dikelola adalah milik publik, dan harus digunakan seefektif serta seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, fungsi otorisasi juga menjadi landasan utama untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, pemborosan, atau praktik korupsi.

b) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan menekankan bahwa anggaran negara berfungsi sebagai pedoman strategis bagi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program pembangunan selama satu tahun anggaran. Dengan kata lain, anggaran bukan sekadar



daftar angka, tetapi mencerminkan rencana kerja nasional yang terukur dan terarah. Ketika suatu belanja atau proyek telah direncanakan dan tercantum dalam anggaran, pemerintah dapat menyiapkan berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan. Hal ini mencakup persiapan teknis, pengadaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penjadwalan yang tepat. Dengan adanya fungsi ini, proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, karena seluruh kegiatan telah memiliki acuan keuangan yang jelas. Fungsi perencanaan dalam anggaran juga membantu dalam menghindari tumpang tindih program, meningkatkan koordinasi antarlembaga, dan menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran negara harus menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pelaksanaan kebijakan pemerintah. Anggaran memberikan batasan dan panduan tentang seberapa banyak sumber daya yang dapat digunakan, untuk keperluan apa saja, oleh siapa, dan dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap program dan pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan disahkan. Melalui fungsi ini, publik dan lembaga pengawas seperti DPR, BPK, serta media dan masyarakat sipil memiliki alat yang sah untuk mengawasi tindakan pemerintah. Apakah pengeluaran negara dilakukan dengan tepat sasaran? Apakah dana publik digunakan sesuai ketentuan? Jika terjadi penyimpangan, fungsi ini memungkinkan adanya penilaian objektif dan bahkan penindakan. Pengawasan yang efektif juga akan mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wawan Mulyawan & Alia, 2020).

Secara umum ada tiga fungsi utama anggaran dalam kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi ini mencerminkan bagaimana anggaran negara digunakan tidak hanya untuk menyediakan barang dan jasa publik, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial serta menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

a) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal mengacu pada peran pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap perekonomian guna memastikan distribusi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dan efisien. Sementara itu, fungsi distribusi berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan hasil produksi dan barang-barang yang dihasilkan masyarakat, agar dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan penduduk. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mengarahkan alokasi

dan redistribusi anggaran negara, terutama dalam program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui instrumen kebijakan fiskal, pemerintah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu maupun aktivitas spesifik dalam perekonomian. Intervensi ini ditujukan untuk menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan pendapatan, baik antar sektor usaha, antar wilayah geografis, maupun antar kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan berbeda. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal juga memainkan peran strategis dalam merespons kondisi darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan akibat wabah penyakit, maupun gangguan stabilitas sosial akibat konflik. Dalam kondisi-kondisi tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya secara tepat untuk memitigasi dampak negatif yang timbul, serta mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak.

b) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berfokus pada upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pembagian hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui kebijakan fiskal seperti sistem pajak yang progresif, subsidi, dan berbagai program bantuan sosial, pemerintah berusaha untuk memperkecil kesenjangan antarindividu, antargolongan pendapatan, dan antarwilayah. Fungsi distribusi ini juga mencakup pendistribusian barang-barang dan layanan yang diproduksi oleh masyarakat agar lebih merata dan adil.

Distribusi anggaran dalam konteks kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tergolong daerah tertinggal. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan pembangunan antar daerah, di mana sejumlah wilayah mengalami keterlambatan dalam perkembangan ekonomi maupun infrastruktur. Oleh karena itu, fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal berperan penting sebagai mekanisme untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

c) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal berfokus pada upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama mempertahankan kondisi full employment (kesempatan kerja penuh) serta kestabilan harga di pasar. Fungsi ini menjadi kunci utama dalam meminimalkan volatilitas dan fluktuasi siklus ekonomi, sehingga kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN) tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meredam gejolak dalam perekonomian. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat efektif untuk mengurangi dampak negatif dari siklus bisnis. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis moneter tahun 1997/1998 dan krisis global pada 2009 menjadi bukti konkret efektivitas peran stabilisasi kebijakan fiskal (Amtiran, 2020).

Melalui perannya dalam stabilisasi ekonomi, APBN digunakan pemerintah sebagai instrumen utama untuk memastikan perekonomian nasional tetap berjalan dalam kapasitas optimalnya. Dalam situasi perlambatan ekonomi, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi fiskal ekspansif, seperti meningkatkan belanja negara guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian mengalami overheating atau pertumbuhan permintaan agregat domestik melampaui kapasitas sektor penawaran, maka pemerintah menerapkan kebijakan fiskal kontraktif atau pengetatan fiskal, guna menahan laju inflasi dan mencegah ketidakseimbangan ekonomi yang lebih besar.

Fungsi stabilisasi ini pada dasarnya berfokus pada dua aspek utama, yakni sebagai alat pengendali inflasi serta penjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, di mana keduanya memiliki keterkaitan erat dan saling memengaruhi. Selain itu, pemerintah dapat mengurangi tekanan inflasi dengan menerapkan strategi sterilisasi anggaran, misalnya dengan cara meningkatkan simpanan pemerintah di Bank Indonesia atau mempercepat pelunasan kewajiban utang luar negeri, sehingga likuiditas di pasar dapat dikendalikan secara lebih efektif.

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBN, Bank Indonesia juga memainkan peran penting sebagai penasihat fiskal strategis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbarui melalui UU No. 3 Tahun 2004, di mana Pasal 54 Ayat 2 secara tegas menyebutkan bahwa Bank Indonesia berkewajiban memberikan pendapat dan pertimbangan resmi kepada pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) (Ekonomi & Unkhair, 2024).

Peran Anggaran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Anggaran pemerintah, yang diimplementasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki peranan yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN bertindak sebagai

instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai berbagai tujuan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan cara menaikkan pajak dan/atau mengurangi belanja negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan pajak dan/atau meningkatkan belanja pemerintah.

APBN memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui penerapan kebijakan fiskal hijau. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan fiskal, yang mencakup penganggaran iklim dan penerbitan obligasi hijau (green bonds). Penerbitan green bonds merupakan langkah penting dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti defisit dalam pengelolaan anggaran, ketergantungan pada sumber daya alam, dan perlunya dukungan dari pemerintahan daerah. Semua ini masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan fiskal hijau (Putra et al., 2025).

Salah satu peran penting kebijakan fiskal adalah redistribusi pendapatan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penerapan sistem pajak progresif. Dalam sistem ini, individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Selain pajak, transfer sosial dan subsidi pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), ini juga memiliki peran signifikan dalam mendukung kelompok rentan (Nurmaini et al., 2025). Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan kurangnya validasi terhadap data penerima bantuan, yang dapat menghambat upaya untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan efektif.

APBN memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam menjaga stabilitas ekonomi, menjalankan kebijakan fiskal hijau, dan mendistribusikan pendapatan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tiga sektor utama: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Subsidi menjadi elemen kunci dalam kebijakan fiskal yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat serta memastikan produsen tetap mampu memproduksi barang dan jasa. Namun, subsidi yang tidak seimbang dan penargetan yang kurang tepat dapat mengakibatkan ketidaksetaraan



ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menyeimbangkan subsidi agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara maksimal (Nabilah & Addainuri, 2025).

Peran Anggaran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional : Anggaran pemerintah, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN, seperti yang dijelaskan dalam (Putra et al., 2025), merupakan dokumen yang berisi rencana keuangan tahunan pemerintah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui APBN, pemerintah dapat mengatur pendapatan dan belanja negara secara efektif untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi.

Peran APBN dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi:

1. Sebagai Stabilisator Ekonomi

APBN dapat digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi, terutama dalam menghadapi siklus bisnis. Ketika ekonomi melambat, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang permintaan agregat (Kartika, 2024). Sebaliknya, saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat dan berpotensi memicu inflasi, pemerintah dapat melakukan kontraksi fiskal dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan permintaan.

2. Redistribusi Pendapatan

APBN dapat digunakan untuk redistribusi pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah melalui sistem perpajakan progresif dan program bantuan sosial. (Nurmaini et al., 2025) menjelaskan bagaimana pajak progresif dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi bagi individu dengan penghasilan lebih tinggi.

3. Pendanaan Investasi

APBN merupakan sumber pendanaan utama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan sektor-sektor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi di sektor-sektor ini akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia.

4. Pengendalian Inflasi

Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi, seperti dengan menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak pada saat terjadi inflasi yang tinggi.

5. Penciptaan Lapangan Kerja

APBN dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program stimulus fiskal dan investasi di sektor-sektor produktif.

Anggaran Penting Untuk Menjaga Kestabilan Ekonomi

Anggaran negara memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, anggaran tidak hanya berfungsi untuk merencanakan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga memainkan peran penting sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian. Anggaran memungkinkan pemerintah untuk mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi yang selalu berubah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang lebih luas.

Stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama bagi seluruh negara dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ketidakstabilan dalam sistem perekonomian suatu negara dapat berdampak negatif, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta tingginya laju inflasi. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong kinerja perekonomian yang sehat. Kajian ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang saling terhubung, di mana berbagai komponen ekonomi bekerja secara sinergis dalam mendukung stabilitas nasional. Variabel-variabel penting dalam ekonomi makro, seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, memiliki peranan strategis sebagai indikator sekaligus instrumen pengendali dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Dengan mempelajari keterkaitan antara variabel-variabel makro tersebut, pemerintah, khususnya otoritas moneter, dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro yang efektif untuk menstabilkan perekonomian nasional (Lubis et al., 2024)

Fungsi stabilisasi anggaran sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti lonjakan inflasi, tingginya angka pengangguran, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian yang disebabkan oleh dinamika global. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah dapat menjaga



keseimbangan dan merespons tantangan ekonomi dengan efektif. Salah satu alasan penting mengapa anggaran negara memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi adalah kemampuannya memberikan dorongan fiskal ketika perekonomian mengalami tekanan. Dalam situasi seperti perlambatan pertumbuhan, krisis global, maupun bencana dalam negeri, pemerintah memerlukan instrumen yang fleksibel untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Di sinilah anggaran negara berfungsi sebagai alat stabilisasi yang memungkinkan negara melakukan intervensi tepat waktu untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas ekonomi merujuk pada situasi di mana perekonomian suatu negara berada dalam kondisi yang seimbang, ditandai dengan inflasi yang tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara konsisten, tingkat pengangguran yang rendah, serta kestabilan nilai tukar mata uang. Kondisi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi beragam aktivitas ekonomi, termasuk investasi, produksi, dan kegiatan perdagangan. Lingkungan ekonomi yang stabil menjadi fondasi krusial dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, karena memberikan kepastian dan kepercayaan bagi pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan strategis (Rahmi, 2014).

Kebijakan fiskal yang meningkatkan anggaran belanja pemerintah harus memperhitungkan dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi. Sinkronisasi dengan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya juga penting agar kebijakan fiskal dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Meningkatnya anggaran belanja pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi yang signifikan. Ketika pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek infrastruktur, layanan publik, dan program pemerintah lainnya, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam prosesnya, pemerintah dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja, menggerakkan sektor-sektor terkait seperti konstruksi, perdagangan, dan manufaktur, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Nazrianti et al., 2021). Selain itu, anggaran negara membantu menjaga distribusi keuangan yang merata di seluruh wilayah. Ketimpangan antar daerah dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, melalui alokasi dana ke daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok, serta program-program pemberdayaan masyarakat, anggaran negara mampu

memperkuat kohesi sosial dan memperluas basis ekonomi nasional.

Pengelolaan anggaran yang baik juga membantu mencegah pemborosan dan korupsi. Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya. Ketika anggaran dikelola dengan transparan, efisien, dan tepat sasaran, maka dampaknya terhadap perekonomian akan jauh lebih besar. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi. Penting pula disadari bahwa anggaran negara memainkan peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Saat pemerintah menjalankan proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit, maka lapangan kerja otomatis tercipta di berbagai sektor, khususnya konstruksi dan jasa. Peningkatan kesempatan kerja ini sangat membantu menjaga kestabilan ekonomi, terutama saat sektor swasta mengalami kelesuan.

Anggaran negara juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, kelompok miskin dan berpenghasilan rendah biasanya menjadi pihak yang paling terdampak. Melalui program bantuan sosial, subsidi, dan perlindungan sosial lainnya, anggaran negara menjadi alat untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga. Anggaran yang disusun dengan visi jangka panjang dapat menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah yang mampu mengarahkan anggarannya pada investasi strategis, seperti energi terbarukan, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, sedang membangun kestabilan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi untuk masa depan.

Anggaran yang berpandangan jauh ke depan akan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan mengarahkan belanja pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, energi bersih, dan digitalisasi, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas saat ini, tetapi juga sedang menyiapkan fondasi bagi generasi mendatang. Tidak kalah penting, anggaran negara juga menunjukkan tanggung jawab moral pemerintah terhadap kelompok rentan. Dalam masa krisis, kelompok miskin dan berpenghasilan rendah sangat bergantung pada perlindungan sosial yang dibiayai oleh negara. Oleh sebab itu, keberadaan anggaran yang inklusif dan responsif menjadi penopang utama stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.



Dengan demikian, bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana anggaran negara dirancang dan dikelola dengan baik. Pemerintah yang mampu menggunakan anggarannya secara cerdas, adaptif, dan adil akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Pengaruh Model Kebijakan Fiskal Di Tingkat Daerah Di Indonesia Memiliki Pencapaian Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal daerah memiliki posisi strategis dalam mendorong tercapainya sasaran-sasaran SDGs, mengingat sistem desentralisasi fiskal memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan. Menurut (Sari et al., 2024b), kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan manusia dan mengurangi ketimpangan wilayah. Pemerintah daerah memainkan peran penting melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terintegrasi dengan target SDGs, sebagaimana diuraikan oleh (Rahman & Sudirman, 2025b). Namun, pengaruh kebijakan ini masih sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal daerah kerap menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Salah satunya adalah ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Wilayah-wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah masih sangat tergantung pada dana transfer pusat, sehingga kurang memiliki otonomi dalam menyusun kebijakan fiskal yang inovatif dan adaptif terhadap tujuan SDGs (Nurmaini et al., 2025). Selain itu, integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah belum sepenuhnya optimal. Masih banyak daerah yang belum memasukkan indikator SDGs ke dalam RPJMD maupun penganggaran tahunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak secara langsung berkontribusi pada pencapaian target global tersebut. Di sisi lain, pendekatan fiskal yang mengadopsi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan masih minim diterapkan. (Putra et al., 2025) menekankan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung transisi hijau dan memperhatikan kelompok rentan masih terbatas, padahal hal ini krusial untuk mencapai SDG 13 (penanggulangan perubahan iklim) dan SDG 10 (pengurangan ketimpangan).

Walau dihadapkan pada berbagai hambatan, kebijakan fiskal di tingkat daerah tetap memiliki potensi besar sebagai pengungkit utama dalam pencapaian SDGs, asalkan diarahkan secara strategis. Salah satu bentuk keberhasilan terlihat dalam penerapan subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mempersempit kesenjangan sosial (Nabilah & Addainuri, 2025). Selain itu, alokasi anggaran yang proporsional untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menunjukkan korelasi yang kuat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal (Sari et al., 2024b). Untuk memperkuat dampak tersebut, diperlukan sejumlah langkah seperti mewajibkan integrasi SDGs dalam siklus perencanaan daerah, penguatan kapasitas birokrasi lokal dalam pengelolaan anggaran berbasis hasil, dan penerapan insentif fiskal berbasis kinerja. (Rahman & Sudirman, 2025b) menambahkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam fiskal daerah akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal. Maka dari itu, sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dengan agenda pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berketahanan jangka panjang.

Contoh Kasus : Pemkab Ponorogo Pangkas Anggaran Rp21 Miliar untuk Efisiensi (2025)

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, Pemkab Ponorogo melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp21 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengeluaran daerah dengan arahan efisiensi nasional dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menurut Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, dan Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno, pemangkasan anggaran mencakup beberapa pos penting:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant Infrastruktur: Rp15 miliar dihapuskan sepenuhnya.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Irigasi: Rp1,8 miliar dihapuskan.
- 3) DAK Non-Fisik di Dinas Kesehatan: Dari Rp46 miliar menjadi hanya Rp200 juta.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas: Dipangkas hingga 50%.
- 5) Penghematan pada Penggunaan Listrik dan Alat Tulis Kantor (ATK): Dilakukan untuk menekan pengeluaran operasional.

Pemangkasan ini berdampak pada penghentian atau penundaan sejumlah program, terutama yang bersumber dari anggaran pusat. Namun, Pemkab Ponorogo berupaya menyesuaikan dengan:



- 1) Menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD): Melalui sektor pajak dan pariwisata untuk menutupi kekurangan anggaran.
- 2) Menjamin Hak ASN: Gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 tetap dibayarkan.
- 3) Melanjutkan Program Prioritas: Pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan dukungan anggaran daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan fungsi stabilisasi dari anggaran pemerintah daerah, di mana Pemkab Ponorogo menyesuaikan pengeluaran untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik utama. Langkah ini menunjukkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap dinamika kebijakan nasional dan kondisi ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Pebrianti, 2025).

IV. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi makro yang dijalankan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui pengelolaan anggaran, yang mencakup penerimaan (terutama dari pajak) dan pengeluaran negara, pemerintah dapat secara langsung memengaruhi dinamika ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ini, anggaran bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi, mengarahkan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat tiga fungsi utama anggaran dalam kebijakan fiskal: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan memastikan penyediaan barang dan jasa publik yang efisien serta pembangunan infrastruktur yang merata. Fungsi distribusi berupaya mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme seperti sistem pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial. Sedangkan fungsi stabilisasi dimaksudkan untuk menjaga kestabilan makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran agar tetap berada dalam kondisi yang terkendali dan dapat diprediksi.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki ruang untuk merespons dinamika ekonomi, seperti krisis moneter, resesi global, atau lonjakan inflasi. Dalam situasi ekonomi yang lesu, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan melalui peningkatan belanja negara atau pemangkasan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang memanas, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk meredam tekanan inflasi.

Dengan demikian, anggaran negara berperan sebagai alat stabilisasi yang fleksibel dan adaptif.

Selain itu, anggaran negara juga menjadi medium untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Peran redistributif dari anggaran, terutama dalam mendukung kelompok masyarakat rentan, turut membantu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

Di tingkat daerah, kebijakan fiskal memainkan peranan yang tidak kalah penting, terutama dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seyogyanya diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal dan nasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, kurangnya integrasi indikator SDGs dalam perencanaan daerah, dan rendahnya efisiensi alokasi anggaran. Meskipun demikian, dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kapasitas birokrasi, insentif berbasis kinerja, dan kolaborasi antarinstansi potensi kebijakan fiskal daerah dalam mempercepat pencapaian SDGs tetap sangat besar.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang efektif dan terencana dengan baik mampu menjadi tulang punggung dalam mewujudkan perekonomian yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dalam era yang ditandai oleh ketidakpastian global dan tantangan multidimensi, seperti perubahan iklim dan digitalisasi, kemampuan pemerintah dalam mengelola anggarannya dengan transparan, akuntabel, dan responsif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efisiensi, serta menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan hingga artikel ini dapat di selesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y. (2020). Amtiran and Molidya. *Journal of Management (SME's)*, 12(2), 203–214.
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Media Mahardhika*, 22(3), 417–428. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v22i3.932>
- Ekonomi, J., & Unkhair, P. (2024). Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15, No. 1. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair*, 15(1), 1–23.
- History, A., Policy, F., & Policy, M. (2024). Pendahuluan Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu pilar utama. *Tidak Disebutkan*, 6(1), 95–108.
- Hnydiuk, I. V., Dalievska, T. A., & Gataullina, E. I. (2018). Fiscal Policy As the Tool of Macroeconomic Regulation. *Scientific Bulletin of Polissia*, 2(1(13)), 107–112. [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1\(13\)-107-112](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-107-112)
- Kartika, R. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia Dari Hambatan Dan Upaya Penanggulangannya. ... *Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and ...*, 4(1), 158–170.
- Lubis, R., Nabila, P., Nasution, N. I., Azzahra, L., Hasrafu, & Andina, F. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 7899–7906.
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 779–799.
- Nabilah, I. Z., & Addainuri, muhammad isbad. (2025). PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR pada peran masing-masing sektor tetapi juga pada bagaimana arus pendapatan dan. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis (JMEBI)*, 1(2), 59–75.
- Nazrianti, I., Rodhitubillah, P., & Lestari, S. (2021). Kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat dampak bagi apbn. 1–18. https://www.academia.edu/104820283/kegiatan_dan_pengeluaran_pemerintah_selalu_meningkat_dampak%0akegiatan
- Nisa, O., Anjely, W., Sari, W. Y., & Faisal, H. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19–30. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1482>
- Nurjaman, A., Astuti, S. R. D., Mubarock, W. F., Mukhtar, R. H., & Aviandika, V. (2022). Analysis of Literature Psychology in the Soekram Trilogy Novel By Sapardi Djoko Damono. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(3), 271–275. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.6383>
- Nurmaini, Zakir, M., & Assyifa, Z. (2025). IMPLIKASI KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP DISTRIBUSI. *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, 2(Huda 2017), 54–61.
- Pebrianti, C. (2025). pemkab ponorogo pangkas Rp 21 Miliar untuk efisiensi anggaran.
- Putra, E., Pratama, I. N., Ningrum, S. D. S., Fitrianiingsih, Lestari, N., Azhari, M. A., Aslan, M., Sarkila, P. agung, & Kartika, P. (2025). Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara: Peluang Dan Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 39–51.
- Rahman, S., & Sudirman. (2025a). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Menjaga. *Inovasi Makro Ekonomi*, 7(1), 141–150.
- Rahman, S., & Sudirman. (2025b). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga. *Inovasi Makro Ekonomi*, 7(1), 141– 150.
- Rahmi, A. (2014). Stabilitas Ekonomi Dalam Islam. *Al-Maslahah; Jurnal Ilmu Syariah*.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024a). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024b). Kebijakan Fiskal dan



Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia.
Journal of Economics, Assets, and Evaluation,
1(4), 1–10.
<https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>

Wawan Mulyawan, A., & Alia, W. (2020). Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan
Nasional. *Salam Islamic Economics Journal*,
1(2), 59.

Yanti, P., Ekonomi, F., Sjech, U. I. N., & Djambek, M.
D. (2024). Korespondensi Penulis 744. *2(7)*,
744–760.

